

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, sektor pariwisata memegang peranan yang sangat strategis sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat, serta berperan dalam pengembangan sosial budaya dan memperkuat citra bangsa Indonesia di luar negri. Di era otonomi daerah saat ini, pembangunan pariwisata menjadi lebih penting lagi bagi pengembangan suatu daerah. Menurut Harefa (2020), Setiap daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Yoeti (2016), pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke destinasi tertentu dengan tujuan bukan untuk menetap atau bekerja. Kontribusi pariwisata terhadap PAD dapat dilihat dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, serta retribusi objek wisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan penerimaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Mahmudi (2016), pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2014), PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi instrumen utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri tidak bergantung pada pemerintah pusat.

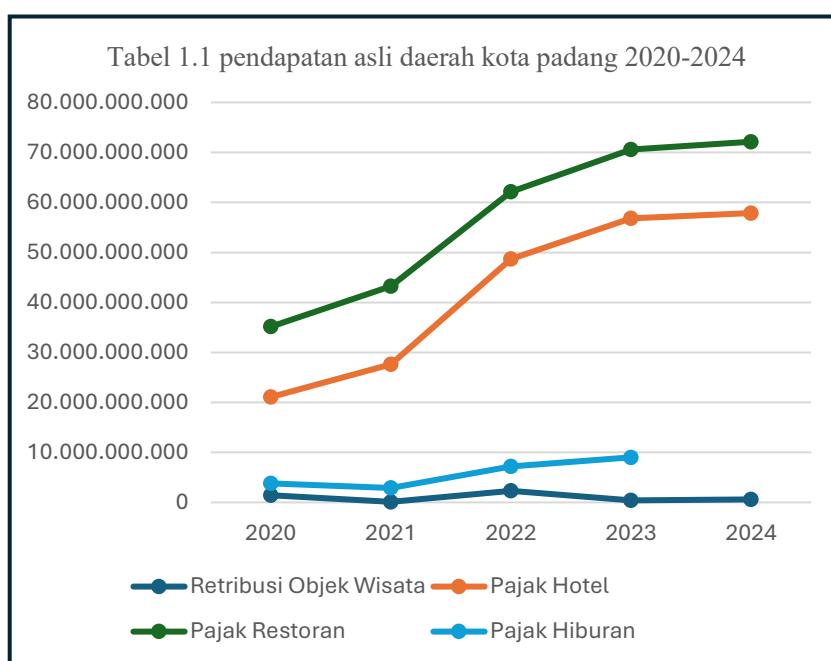
Kota Padang memiliki Destinasi wisata yang kaya akan ragam pengalaman. Menawarkan berbagai jenis wisata mulai dari kuliner, alam, bahari, budaya, religi, dll. kota ini juga memiliki keunikan dan ciri khas yang tersendiri. Salah satu aspek yang mencolok adalah sebagai pusat seni, budaya, dan dikenal dengan masakan khasnya. Dari berbagai perspektif, kota Padang menarik untuk dikunjungi oleh semua kalangan, terutama karena nasi padang dan rendang yang sangat terkenal di sana. Saat ini, terdapat 172 jenis objek wisata dan daya tarik di Kota Padang yang menawarkan fasilitas pariwisata yang baik dan memadai. diantaranya, Gunung Padang, Pantai Padang, Pantai Air Manis, dan lain-lain menurut (BPS, 2023)

Perkembangan pariwisata di Kota Padang memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diterima pemerintah kota Padang karena dampak berganda pariwisata terhadap perekonomian masyarakat sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengunjung yang datang ke objek wisata, semakin bagus kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya karena meningkatnya berbagai usaha yang dapat dijalankan.

Kontribusi dari sektor pariwisata mencakup pendapatan dari retribusi objek wisata, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Seiring dengan pertumbuhan objek wisata, fasilitas pendukungnya juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kontribusi sektor pariwisata ini masih bisa dioptimalkan terhadap pendapatan daerah dengan cara memberdayakan objek-objek wisata tersebut sehingga menarik dan bisa meningkatkan jumlah pengunjungnya, dengan demikian jika kontribusi sektor wisata meningkat maka semua penerimaan pariwisata juga otomatis meningkat terhadap pendapatan daerah.

Dilihat dari tahun 2020 s/d 2024 peningkatan wisatawan negara maupun manca negara terus meningkat yang berdampak pada penikatan PAD Kota Padang bisa dilihat dari data yang dilapirkan dibawah ini.



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah kota padang dari sektor pariwisata yaitu dari pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2024 dari 35.147.316.035 menjadi 72.147.776.720, telah meningkat 105%. Begitu

juga dengan pajak hotel yang meningkat pesat dari tahun 2020 sampai 2024. Sedangkan pajak hiburan mengalami peningkatan yang kecil. Retribusi objek wisata justru mengalami penurunan. Dengan ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan dengan baik terhadap pariwisata dikota padang, karena itu prosedur pengelolaan administrasi pendapatan sangat penting dilakukan untuk pengukuran atas pencapaian suatu kinerja instansi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan penilaian pengambilan kebijakan

Dari pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis laporan akhir dengan judul "PROSEDUR PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH DI BIDANG PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengelolaan administrasi pendapatan daerah dibidang pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan administrasi pendapatan daerah di bidang pariwisata?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas prosedur pengelolaan administrasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata?

1.3 Tujuan Magang

A. Tujuan Umum

1. Memberi Pengalaman kerja kepada Mahasiswa untuk terjun langsung dalam kerja lapangan pada instansi pemerintahan.
2. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap dunia kerja berupaya pengaplikasian ilmu terhadap kegiatan yang dilakukan.
3. Mahasiswa dapat mempelajari fakta-fakta dalam pengelolaan tempat wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Memperkenalkan Mahasiswa yang sedang menjalani kegiatan magang pada dunia kerja sehingga memiliki wawasan dan motivasi diri untuk masa depan.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi jurusan Keuangan Negara dan Perbankan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

B. Tujuan Khusus

1. Mengkaji Prosedur administrasi dibidang pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Padang.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosedur pengelolaan administrasi pendapatan daerah dibidang pariwisata.
3. Mengidentifikasi upaya yang bisa untuk meningkatkan efektifitas prosedur pengelolaan administrasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori serta mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menilai kinerja keuangan instansi serta membantu pengambilan keputusan manajerial dalam mengambil keputusan untuk masalah keuangan yang dihadapi bagi pihak lain

3. Bagi Pihak Lain

- a. Sebagai referensi dan pedoman bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai bahan kajian untuk membandingkan konsep yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang atau praktik lapangan ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Padang yang beralamat di Jl. Gandaria No.56, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. (0751) 34186. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian dan keuntungan dari kegiatan, tempat dan waktu magang, dan penulisan laporan yang sistematis.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori pendukung yang relevan dengan judul penelitian yang dibahas.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pembahasan mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, penjelasan logo, visi dan misi, serta deskripsi perusahaan pekerjaan dan struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang bagaimana Prosedur Pengelolaan Administrasi Tempat Wisata Kota Padang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang, dan Apakah terdapat hambatan dan kendala dalam pengelolaan tempat wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi dalam mendukung keberlangsungan kegiatan bisnis, serta bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan latihan atau magang.